



Share :



Defisit Berisiko, Maksimalkan Penerimaan Serta Ubah Pola Belanja dan Pembiayaan

Kamis, 18 Juni 2020 | 10:24 WIB

Penulis: Modesta Fiska

SEMARANG, suaramerdeka.com - Defisit **APBN** yang melebar sebesar Rp 548,8 triliun merupakan pilihan yang tidak mudah tapi harus dilakukan untuk mempercepat penanganan Covid-19 dan menyelamatkan **perekonomian** agar tidak terjatuh pada krisis lebih dalam serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

Ekonom Unika Soegijapranata Angelina Ika Rahutami mengungkapkan, pemerintah dari awal pasti mengetahui dan menyiapkan kebijakan untuk mendorong pendapatan negara. Yang menjadi masalah saat ini adalah pendapatan negara turun lebih cepat dan tajam saat pandemi. "Rasio pendapatan negara terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir ini memang mengalami penurunan," kata Ika Rahutami, Kamis (18/6).

Seperti diketahui penerimaan negara terbesar berasal dari penerimaan **pajak**. Penerimaan pajak dari Januari sampai Mei 2020 hanya mencapai 27,06 persen dari target APBN 2020, atau 35,45 persen dari target Perpres 54/2020. Pada bulan Mei, secara year on year mengalami penurunan sebesar -38,18 persen.

Penerimaan pajak selama ini bertumpu pada sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa keuangan. Saat ini sektor perdagangan, dan manufaktur merupakan sektor yang termasuk paling terpuak. Jadi dampaknya pasti pendapatan negara akan menjadi berat. Sedangkan belanja negara tdk dapat ditahan karena itu tugas pemerintah.

"Defisit yang diperbolehkan sampai 5,4 persen PDB tentu memiliki risiko bila terus menerus terjadi. Tapi yang harus dipahami ini adalah kasus khusus sehingga bila defisit ini masih akan relatif aman bagi perekonomian, bila terjadi hanya dalam kerangka penyelamatan dan mitigasi Covid," kata Ika.

Pengaruh defisit bagi APBN tahun-tahun berikutnya adalah harus terjadi perubahan struktur belanja dan pembiayaan serta mengupayakan kenaikan penerimaan di tahun berikutnya. "Artinya beban defisit saat ini sebenarnya tidak dialihkan atau menjadi beban defisit tahun berikutnya, namun harus disikapi dengan kerja keras dari sisi upaya menaikkan penerimaan, dan mendorong pola perubahan belanja dan pembiayaan," tegasnya.

Ika menambahkan, untuk membuat penerimaan tahun 2020 tidak anjlok diperkirakan akan sulit, tidak mudah dan hampir tidak bisa, karena data 3 tahun terakhir trennya juga menurun. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana strategi untuk tahun berikutnya.

Dijelaskan lebih lanjut, dari sisi penerimaan pajak, pada tahun 2020, berdasarkan pertumbuhan Mei turun 10,8% (yoy). Penerimaan pajak yang mengalami penurunan terbesar Mei 2020 (yoy) adalah PPH migas (-35,6%), kemudian kepabeanan dan cukai (-12,4%). Dari bea dan cukai yang turun paling besar adalah bea keluar (-27,5%), ini menunjukkan ekspor Indonesia yang melemah.

Cukai masih naik sebesar 18,8%. PPh OP dan PPh 26 juga masih naik. Cukai yang naiknya besar adalah cukai hasil tembakau dan ethil alcohol. Yang menjadi masalah adalah kenaikan CHT dan CEA, yang memang pola konsumsinya adalah inelastis. Sedangkan yang lain dari sisi konsumsi maupun produksi adalah menurun.

"Data ini menunjukkan dari sisi penerimaan membutuhkan strategi yang tepat. Salah satu cara adalah dengan adanya sosialisasi yang lebih kuat, sehingga para WP akan bersedia secara sukarela membayar pajak. Penggunaan IT dengan edukasi cara bayar perlu dilakukan secara lebih massif. Pendataan bagi WP yang eligible mendapat insentif pajak juga sebaiknya dilakukan secara tepat sasaran," imbuah Ika.